

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 027-A/HK.01.01/K.SB-05/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADANG
PARIAMAN NOMOR : 027.A/HK.01.01/K.SB-05/10/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Pariaman ;
 - b. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu maka perlu pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman , Kepolisian Resor Padang Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Padang Pariaman .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
10. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 14 Juli Tahun 2022;
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 013/PP.00.02/K.SB-05/08/2022 perihal permintaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 4 Agustus 2022;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 007/PP.00.02/K.SB-05/07/2022 perihal permintaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 21 Juli 2022;
14. Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman Nomor Sprin/601/VIII/HUK.6.6/2022 perihal mengirimkan nama-nama personil tertanggal 4 Agustus 2022;
15. Surat Kepolisian Resor Pariaman Nomor Sprin/757/VII/HUK.6.6/2022 perihal mengirimkan nama personil Polres Padang Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 3 Agustus 2022;
16. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : B-2499/I.3.13/Es/07/2022, tertanggal 27 Juli 2022 Perihal personil Sentra Gakkumdu Kabupten Padang Pariaman (unsur Kejaksaan);
18. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : B-4643/I.3.13/Es/11/2022, tertanggal 1 November 2022 Perihal personil Sentra Gakkumdu Kabupten Padang Pariaman (unsur Kejaksaan);
19. Surat Kepolisian Resor Pariaman Nomor Sprin/35/II/HUK.6.6/2023 perihal mengirimkan nama personil Polres Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 10 Februari 2023;
20. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : B-825/L.3.13/Es/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023 Perihal personil Sentra Gakkumdu Kabupten Padang Pariaman (unsur Kejaksaan);
21. Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman Nomor Sprin/216/II/HUK.6.6/2023 perihal mengirimkan nama personil Polres Padang Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 13 Februari 2023;
22. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : Print- 778/L.3.13/Cp.1-05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Padang Pariaman unsur Kejaksaan;
23. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : B-4001/L.3.13/Es/08/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 Perihal Pertukaran dan Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Padang Pariaman unsur Kejaksaan;
23. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tertanggal 18 Agustus 2023 perihal Pengakatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat masa Jabatan 2023-2028
24. Surat Kepolisian Resor Pariaman Nomor Sprin/31/I/HUK.6.6/2024 perihal mengirimkan nama personil Polres Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 1 Januari 2024;
24. Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman Nomor Sprin/59/I/HUK.6.6/2024 perihal mengirimkan nama personil Polres Padang Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 15 Januari 2024;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023

- 21 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADANG PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah/Penasehat
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - b. Penanggung Jawab/Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 2. berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - c. Ketua/Koordinator
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - d. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT :** Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Pengarah/Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 2. Penanggung Jawab/Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan
- KELIMA :** Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM :** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.;
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pauh Kamba
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA;



AZWAR MARDIN

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran Nomor : 00 /HK.01.01/K.SB-05/1/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	AZWAR MARDIN	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2	BAGUS PRIYONGGO, SH., MH.CLA	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
3	AKBP. ANDREANALDO ADEMI, SH., SIK	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
4	AHMAD FAISOL AMIR, S.I.K., M.Si	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
5	INDRA GUNAWAN	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU PADANG PARIAMAN
6	WENDRY FINISA, SH.,MH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
7	JON HENDRI, SH	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
8	ARMIJON SH., MH	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
9	IRWANDI	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU PADANG PARIAMAN
10	MUHAMMAD KINAN LUBIS	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
11	MUHAMMAD ARVI, S.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
12	AA REGGY. S.Tr.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG

			PARIAMAN
13	BAIQ NILA ULFAINI. S.Sos.,M.PA	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU PADANG PARIAMAN
14	ALI GUSNIAR. SH	ANGGOTA	KASUBAG HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU PADANG PARIAMAN
15	FITRI MAHYUDDIN	ANGGOTA	BPP BAWASLU PADANG PARIAMAN
16	FATIZAH RAHMI.S.IP	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
17	MUHAMMAD ARI WIBOWO. SS	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
18	HIMADIAR DARWIN.,SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
19	ADEK MAIYUZA.,SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
20	SUCI FITRIANY. SH., MH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
21	TENGKU ISMAIL. SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22	RAFLINDA. SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
23	RINTO ALWI.,SH.,MH	ANGGOTA	KANIT IV SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
24	OPTAH JHONEDI, SH., MH	ANGGOTA	KANIT IV SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
25	HARIS TAMIN GADRO. SH	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
26	M. FADHLI BUDIMAN	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM

			KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
27	DIAN FERI MAIZAL, SH., MM	ANGGOTA	KANIT IDIT II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
28	MAIGRA SAKRAWIRA USMAN	ANGGOTA	Ps. KAURMINTU SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
29	ROY WIRMA AMIR PUTRA. SH	ANGGOTA	BA UNIT IDIK II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
30	MULYADI CHANDRA.,SH	ANGGOTA	BA UNIT IDIK II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN


KETUA,
AZWAR MARDIN